

**BAGIAN ANGGARAN 089**



**LAPORAN KEUANGAN  
*AUDITED***

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : KU.02/LAP-148/PW14/1/2022  
TANGGAL : 30 MEI 2022**

Jalan Jenderal Ahmad Yani  
Pontianak 78124

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, 30 Mei 2022

Kepala Perwakilan,



Ayi Riyanto  
NIP 197008181991031002

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
A.6. Capaian Output Strategis pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	18
A.7. Refocusing Kegiatan/Realokasi Anggaran PC PEN serta Output Pelaksanaan PC PEN	19
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	21
B.2. Belanja Negara	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar	28
C.2. Aset Tetap	30
C.3. Aset Lainnya	38
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	39
C.5. Ekuitas	41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	42
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	42
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	50
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
E.1. Ekuitas Awal	55
E.2. Surplus/(Defisit) LO	55
E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas	55
E.4. Transaksi Antar Entitas	56
E.5. Ekuitas Akhir	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
F.1. Informasi Dana Bantuan Kedinasan	58



## DAFTAR TABEL

## Halaman

Tabel 1	: Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	21
Tabel 2	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program per 31 Desember 2021	22
Tabel 3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja per 31 Desember 2021	22
Tabel 4	: Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	23
Tabel 5	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021	24
Tabel 6	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	24
Tabel 7	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021	25
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	25
Tabel 9	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021	26
Tabel 10	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	26
Tabel 11	: Rincian Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19	27
Tabel 12	: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	28
Tabel 13	: Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	28
Tabel 14	: Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	30
Tabel 15	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021	37
Tabel 16	: Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	38
Tabel 17	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	40
Tabel 18	: Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	40
Tabel 19	: Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021	41
Tabel 20	: Rincian PNBP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	42
Tabel 21	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA	43
Tabel 22	: Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	43
Tabel 23	: Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	44
Tabel 24	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA	44
Tabel 25	: Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	45
Tabel 26	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Persediaan dan Jasa per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA	46
Tabel 27	: Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	47
Tabel 28	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA	47
Tabel 29	: Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	48
Tabel 30	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA	48
Tabel 31	: Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	49
Tabel 32	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	50

Tabel 33	: Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19	50
Tabel 34	: Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	51
Tabel 35	: Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	53
Tabel 36	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA	53
Tabel 37	: Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	54

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok
  - A. Neraca Saldo Awal
  - B. Neraca Percobaan Basis Kas
  - C. Neraca Percobaan Basis Akrua
  - D. Laporan Realisasi Anggaran
  - E. Neraca
  - F. Laporan Operasional
  - G. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara
4. Laporan BMN dari Aplikasi E-Rekon per 31 Desember 2021
5. Laporan Barang Milik Negara
  - A. Laporan Posisi Barang Milik Negara per 31 Desember 2021
  - B. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel per 31 Desember 2021
  - C. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel per 31 Desember 2021
  - D. Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel per 31 Desember 2021
  - E. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel per 31 Desember 2021
  - F. Berita Acara Opname Fisik Persediaan per 31 Desember 2021
6. Daftar Rincian Biaya Bantuan Kedinasan per 31 Desember 2021



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan *Audited* Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 30 Mei 2022

Kepala Perwakilan,

Ayi Riyanto  
NIP 197008161991031002



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan *Audited* Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp110.045.100,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.411.989.877,00 atau mencapai 99,79 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp19.453.057.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp202.293.628.656,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp213.438.581,00, Aset Tetap (Neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp202.072.559.200,00, dan Aset Lainnya (Neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp7.630.875,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp122.894.809,00 dan Rp202.170.733.847,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.536.378,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp20.310.656.171,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai



Rp20.279.119.793,00. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp10.424.364,00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp20.268.695.429,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp202.963.897.501,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp20.268.695.429,00, ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi nilai ekuitas senilai minus Rp3.974.850,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp19.479.506.625,00. Sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp202.170.733.847,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021			31 DES 2020 REALISASI
			ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	
A	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	B.1.				
	■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		0,00	110.045.100,00	0,00	10.752.400,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>0,00</b>	<b>110.045.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.752.400,00</b>
B	<b>BELANJA</b>	B.2.				
	■ Belanja Pegawai	B.2.1.	12.603.342.000,00	12.592.543.495,00	99,91	15.401.648.104,00
	■ Belanja Barang	B.2.2.	6.577.997.000,00	6.551.397.383,00	99,60	6.220.308.645,00
	■ Belanja Modal	B.2.3.	271.718.000,00	268.048.999,00	98,65	1.107.666.968,00
	<b>Jumlah Belanja</b>		<b>19.453.057.000,00</b>	<b>19.411.989.877,00</b>	<b>99,79</b>	<b>22.729.623.717,00</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran /  
  
 Ayi Riyanto  
 NIP 197008181991031002

## II. NERACA

**BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2021	31 DES 2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1.</b>		
- Persediaan	C.1.1.	213.438.581,00	186.868.982,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>213.438.581,00</b>	<b>186.868.982,00</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2.</b>		
- Tanah	C.2.1.	189.634.719.000,00	189.634.719.000,00
- Peralatan dan Mesin	C.2.2.	6.021.561.030,00	6.542.123.204,00
- Gedung dan Bangunan	C.2.3.	12.884.431.000,00	12.788.351.000,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	412.445.600,00	412.445.600,00
- Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	23.990.000,00	33.988.100,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	28.720.000,00	28.720.000,00
- Akumulasi Penyusutan	C.2.7.	(6.933.307.430,00)	(6.655.936.830,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>202.072.559.200,00</b>	<b>202.784.410.074,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.3.</b>		
- Aset Tak Berwujud	C.3.1.	61.047.000,00	61.047.000,00
- Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	(53.416.125,00)	(38.154.375,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>7.630.875,00</b>	<b>22.892.625,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>202.293.628.656,00</b>	<b>202.994.171.681,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.4.</b>		
- Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	70.510.920,00	22.866.513,00
- Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2.	52.383.889,00	7.407.667,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>122.894.809,00</b>	<b>30.274.180,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
- Ekuitas	C.5.	202.170.733.847,00	202.963.897.501,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>202.170.733.847,00</b>	<b>202.963.897.501,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>202.293.628.656,00</b>	<b>202.994.171.681,00</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran

  
 Ayi Riyanto  
 NIP. 197008181991031002



## III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2021	31 DES 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1</b>		
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1.1</b>		
- Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	31.536.378,00	31.655.400,00
<b>Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1)</b>		<b>31.536.378,00</b>	<b>31.655.400,00</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1.2</b>		
- Beban Pegawai	D.1.2.1	12.633.403.495,00	15.397.999.134,00
- Beban Persediaan	D.1.2.2	428.875.892,00	475.333.144,00
- Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	1.880.018.083,00	2.230.425.962,00
- Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	586.610.657,00	461.507.867,00
- Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	3.644.104.400,00	2.981.080.725,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	1.137.643.644,00	1.007.978.867,00
<b>Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)</b>		<b>20.310.656.171,00</b>	<b>22.554.325.699,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.2</b>		
<b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>	<b>D.2.1</b>		
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.1	31.333.500,00	0,00
- Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.2	10.178.100,00	0,00
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar (D.2.1.1-D.2.1.2)</b>		<b>21.155.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>D.2.2</b>		
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.1	2.199.000,00	11.113.715,00
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.2	12.930.036,00	15.311.086,00
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1-D.2.2.2)</b>		<b>(10.731.036,00)</b>	<b>(4.197.371,00)</b>
<b>Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)</b>		<b>10.424.364,00</b>	<b>(4.197.371,00)</b>
<b>Surplus /(Defisit) Laporan Operasional (D.1+D.2)</b>		<b>20.268.695.429,00</b>	<b>22.526.867.670,00</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran

  
 Ay Riyanto  
 NIP 197008181991031002



## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

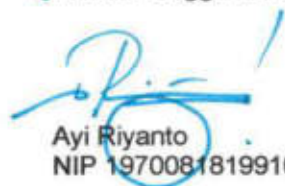
**BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2021	31 DES 2020
EKUITAS AWAL	E.1	202.963.897.501,00	202.771.893.854,00
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	E.2	(20.268.695.429,00)	(22.526.867.670,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI) NILAI EKUITAS	E.3	<b>(3.974.850,00)</b>	<b>0,00</b>
- Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1	(3.974.850,00)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
- Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	19.411.989.877,00	22.729.623.717,00
- Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(110.045.100,00)	(10.752.400,00)
- Transfer Masuk	E.4.3	117.561.848,00	0,00
- Hibah	E.4.4	60.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Transaksi Antar Entitas</b>		<b>19.479.506.625,00</b>	<b>22.718.871.317,00</b>
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.5)</b>		<b>(792.350.815,00)</b>	<b>192.003.647,00</b>
<b>EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)</b>	<b>E.5</b>	<b>202.170.733.847,00</b>	<b>202.963.897.501,00</b>

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

eKuasa Pengguna Anggaran



Ayi Riyanto  
NIP 197008181991031002

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Profil dan  
Kebijakan Teknis*

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih *mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

⚡ Kepala Perwakilan	: Dr. Ayi Riyanto, Ak., M.Si.
⚡ Kepala Bagian Umum	: Puji Basuki, S.E.
⚡ Koordintor Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat	: Bona Petrus Purba, Ak
⚡ Koordinator Pengawasan Bidang APD	: Jonchon Samosir, S.E.
⚡ Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara	: Daridin, Ak., M.M.
⚡ Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi	: Hisyam Wahyudi, Ak. M.M.
⚡ Koordinator Pengawasan Bidang P3A	: Bonifacius Fredy Joko Susilo, SE, M.Si.
⚡ Subkoordinator Kepegawaian	: Bertus Hardi Pardede, S.H.
⚡ Subkoordinator Keuangan	: Lilik Prasetyo, S.E.
⚡ Subkoordinator Pengelolaan BMN, Rumah Tangga dan Kearsipan	: Slamet Dadang Kuniadi

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi*

## **A.3. BASIS AKUNTANSI**

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya



pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:



**Pendapatan-LRA**

**(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-LO**

**(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Belanja**

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Beban**

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Aset**

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar**

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

(SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

**Aset Tetap**

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.



- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian



dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

*Penyusutan Aset  
Tetap*

### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara

Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

**Piutang Jangka Panjang**

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

**Aset Lainnya**

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

**Kewajiban****(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**Ekuitas****(7) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



#### A.6. Capaian *Output* Strategis Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Capaian *Output* Strategis selama Tahun Anggaran 2021 yang telah dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah :

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Perentase Penyelesaian	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	3701. FAG	Pengawasan Pembangunan	2.660.551.000	2.648.446.940	99,55	124	130	104,84
2	3701. UAG	Pengawasan Pembangunan	821.347.000	815.194.743	99,25	43	45	104,65
<b>Total</b>			<b>3.481.898.000</b>	<b>3.463.641.683</b>	<b>99,48</b>	<b>167</b>	<b>175</b>	<b>104,79</b>

Dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat melakukan serangkaian kegiatan pencegahan dan penanganan COVID di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Barang	2.474.878.000,00	2.465.214.044,00	99,61
2	Belanja Modal	25.070.000,00	25.070.000,00	100,00
<b>Total</b>		<b>2.499.948.000,00</b>	<b>2.490.284.044,00</b>	<b>99,61</b>

Realisasi kegiatan secara umum dari penggunaan anggaran untuk operasional pencegahan dan penanganan COVID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
- Pengadaan masker, vitamin, disinfektan dan alat-alat protokol kesehatan lainnya.
- *Rapid test antigen* dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR).
- Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk sarana dan prasarana rumah isolasi mandiri yang terletak di Jl. Gusti Hamzah No.17.

#### A.7. Refocusing Kegiatan/Realokasi Anggaran PC PEN serta output pelaksanaan PC PEN

➤ Refocusing kegiatan/realokasi anggaran

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), BPKP melakukan *refocusing* kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program sebagai berikut:

1. Refocusing PC PEN dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT)
2. Refocusing PC PEN dari Belanja Pegawai

➤ Capaian Output pelaksanaan PC PEN

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), output yang telah dicapai sebagai berikut:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen tase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
<b>Refocusing PC PEN dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT)</b>								
1	3701.FAG	Pengawasan Pembangunan	2.155.640.000	2.147.804.638	99,64	93	97	104,30
2	3701.UAG	Pengawasan Pembangunan	215.198.000	214.745.098	99,79	13	13	100,00
<b>Refocusing PC PEN dari Anggaran Belanja Pegawai</b>								
1	3676.EAD	Layanan Sarana Internal	25.070.000	25.070.000	100,00	5	5	100,00
2	3676.EAA	Layanan Perkantoran	104.040.000	102.664.308	98,68	1	1	100,00

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Pagu Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 semula sebesar Rp21.573.270.000,00 dan beberapa kali dilakukan revisi menjadi Rp19.453.057.000,00. Adapun revisi tersebut antara lain berupa pengurangan/penambahan pagu belanja (Pegawai/Barang/Modal), penambahan belanja (barang/modal) untuk penanganan pandemi COVID-19 pada fasilitas dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat serta penambahan belanja barang untuk pengawasan percepatan penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Rincian pagu Pendapatan dan Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Anggaran Belanja
Anggaran Semula	17.091.377.000,00	4.251.893.000,00	230.000.000,00	21.573.270.000,00
Refocusing dan Realokasi Tahap I		(410.627.000,00)		(410.627.000,00)
Penambahan dari BA BUN (ABT)		4.520.592.000,00		4.520.592.000,00
Refocusing dan Realokasi Tahap II	(3.767.067.000,00)			(3.767.067.000,00)
Optimalisasi Belanja Pegawai		70.030.000,00	106.146.000,00	176.176.000,00
Refocusing dan Realokasi Tahap III		24.880.000,00	(168.589.000,00)	(143.709.000,00)
Refocusing dan Realokasi Tahap IV		(2.010.864.000,00)		(2.010.864.000,00)
Realokasi Anggaran Triwulan III	(360.266.000,00)	36.254.000,00		(324.012.000,00)
Optimalisasi Belanja Pegawai II	(360.702.000,00)	95.839.000,00	104.161.000,00	(160.702.000,00)
<b>Anggaran</b>	<b>12.603.342.000,00</b>	<b>6.577.997.000,00</b>	<b>271.718.000,00</b>	<b>19.453.057.000,00</b>



Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja adalah sebagai berikut:

Program	Jumlah Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Pelaksanaan Dukungan Manajemen BPKP	20.437.727.000,00	15.971.159.000,00
Program Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan BPKP	1.135.543.000,00	3.481.898.000,00
<b>Total</b>	<b>21.573.270.000,00</b>	<b>19.453.057.000,00</b>

Pendapatan  
Negara dan Hibah  
Rp110.045.100,00

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp110.045.100,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Realisasi PNBP Lainnya per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp99.292.700,00 atau 923,45 persen dibandingkan realisasi PNBP Tahun 2020 sebesar Rp10.752.400,00 disebabkan adanya Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan serta Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Tahun Yang Lalu.

Perbandingan realisasi PNBP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	31.333.500,00	0,00	31.333.500,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	76.512.600,00	10.752.400,00	65.760.200,00	611,59
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.199.000,00	0,00	2.199.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>110.045.100,00</b>	<b>10.752.400,00</b>	<b>99.292.700,00</b>	<b>923,45</b>

Belanja Negara  
(Rp19.411.989.877,00)

## B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja per 31 Desember 2021 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp19.411.989.877,00 atau 99,79 persen dari anggaran sebesar Rp19.453.057.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Menurut Program per 31 Desember 2021**

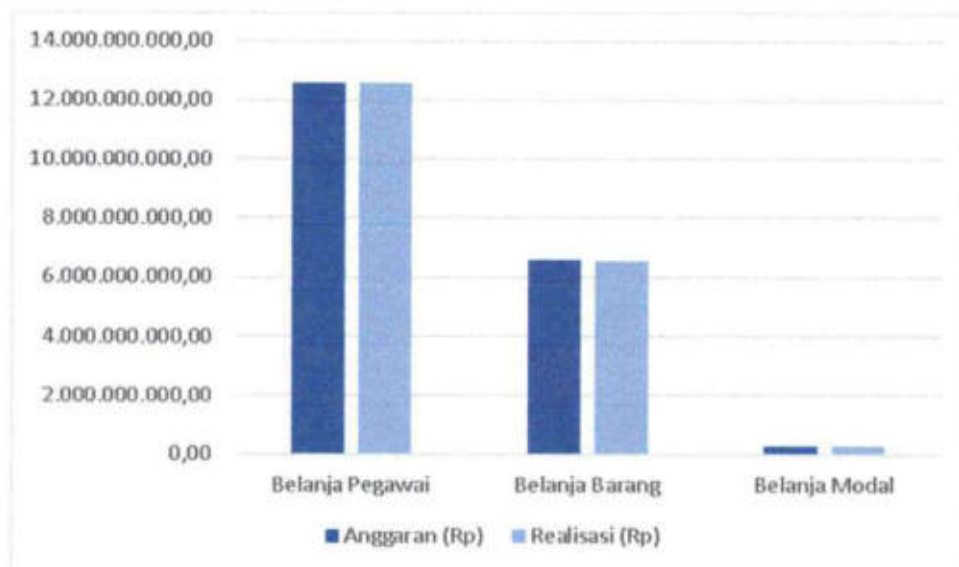
Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
CH 3701	Pelaksanaan Dukungan Manajemen BPKP	15.971.159.000,00	15.948.348.194,00	99,86
WA 3676	Program Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan BPKP	3.481.898.000,00	3.463.641.683,00	99,48
<b>Jumlah</b>		<b>19.453.057.000,00</b>	<b>19.411.989.877,00</b>	<b>99,79</b>

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja per 31 Desember 2021**

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	12.603.342.000,00	12.592.543.495,00	99,91
52	Belanja Barang	6.577.997.000,00	6.551.397.383,00	99,60
53	Belanja Modal	271.718.000,00	268.048.999,00	98,65
<b>Jumlah</b>		<b>19.453.057.000,00</b>	<b>19.411.989.877,00</b>	<b>99,79</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.317.633.840,00 atau 14,60% dibandingkan realisasi belanja Tahun 2020 disebabkan adanya *refocusing* anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19.

Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
Perbandingan Realisasi Belanja  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
		31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	12.592.543.495,00	15.401.648.104,00	(2.809.104.609,00)	(18,24)
52	Belanja Barang	6.551.397.383,00	6.220.308.645,00	331.088.738,00	5,32
53	Belanja Modal	268.048.999,00	1.107.666.968,00	(839.617.969,00)	(75,80)
	<b>Total</b>	<b>19.411.989.877,00</b>	<b>22.729.623.717,00</b>	<b>(3.317.633.840,00)</b>	<b>(14,60)</b>

Belanja Pegawai  
Rp12.592.543.495,00

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp12.592.543.495,00 dan Rp15.401.648.104,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:



**Tabel 5**  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.896.660.000,00	5.888.392.229,00	99,86
Belanja Lembur	424.212.000,00	421.873.000,00	99,45
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	6.282.470.000,00	6.282.278.266,00	100,00
<b>Total</b>	<b>12.603.342.000,00</b>	<b>12.592.543.495,00</b>	<b>99,91</b>

Realisasi belanja pegawai (*netto*) sebesar Rp12.592.543.495,00 berasal dari belanja pegawai (*bruto*) sebesar Rp12.592.544.182,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp687,00.

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2020, terdapat penurunan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.809.104.609,00 atau 18,24 persen disebabkan berkurangnya jumlah pegawai dibandingkan tahun 2020 serta *refocusing* anggaran belanja pegawai berupa penghapusan tunjangan kinerja untuk THR dan Gaji ke-13.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.888.392.229,00	7.007.089.682,00	(1.118.697.453,00)	(15,97)
Belanja Lembur	421.873.000,00	903.666.000,00	(481.793.000,00)	(53,32)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	6.282.278.266,00	7.490.892.422,00	(1.208.614.156,00)	(16,13)
<b>Total</b>	<b>12.592.543.495,00</b>	<b>15.401.648.104,00</b>	<b>(2.809.104.609,00)</b>	<b>(18,24)</b>

Belanja Barang  
Rp6.551.397.383,00

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp6.551.397.383,00 dan Rp6.220.308.645,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.482.491.000,00	1.478.967.606,00	99,76
Belanja Barang Non Operasional	54.749.000,00	52.677.451,00	96,22
Belanja Barang Persediaan	447.621.000,00	447.448.650,00	99,96
Belanja Jasa	344.953.000,00	341.588.619,00	99,02
Belanja Pemeliharaan	586.616.000,00	586.610.657,00	100,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.661.567.000,00	3.644.104.400,00	99,52
<b>Total</b>	<b>6.577.997.000,00</b>	<b>6.551.397.383,00</b>	<b>99,60</b>

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp6.551.397.383,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp6.551.697.383,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp300.000,00.

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2020, terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp331.088.738,00 atau 5,32 persen antara lain disebabkan adanya penambahan anggaran Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19.

Perbandingan realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.478.967.606,00	1.573.231.931,00	(94.264.325,00)	(5,99)
Belanja Barang Non Operasional	52.677.451,00	174.482.500,00	(121.805.049,00)	(69,81)
Belanja Barang Persediaan	447.448.650,00	548.310.835,00	(100.862.185,00)	(18,40)
Belanja Jasa	341.588.619,00	481.694.787,00	(140.106.168,00)	(29,09)
Belanja Pemeliharaan	586.610.657,00	461.507.867,00	125.102.790,00	27,11
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.644.104.400,00	2.981.080.725,00	663.023.675,00	22,24
<b>Total</b>	<b>6.551.397.383,00</b>	<b>6.220.308.645,00</b>	<b>331.088.738,00</b>	<b>5,32</b>



Belanja Modal  
Rp268.048.999,00

### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp268.048.999,00 dan Rp1.107.666.968,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9**  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.427.000,00	231.968.999,00	98,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.291.000,00	36.080.000,00	99,42
<b>Total</b>	<b>271.718.000,00</b>	<b>268.048.999,00</b>	<b>98,65</b>

Realisasi belanja modal (*netto*) sebesar Rp268.048.999,00 berasal dari belanja modal (*bruto*) sebesar Rp268.048.999,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00.

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2020, terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp839.617.969,00 atau 75,80 persen antara lain disebabkan adanya *refocusing* belanja modal untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Perbandingan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

**Tabel 10**  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.968.999,00	1.078.946.968,00	(846.977.969,00)	(78,50)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.080.000,00	28.720.000,00	7.360.000,00	25,63
<b>Total</b>	<b>268.048.999,00</b>	<b>1.107.666.968,00</b>	<b>(839.617.969,00)</b>	<b>(75,80)</b>

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp268.048.999,00 telah dicatat sebagai perolehan Aset Tetap dengan Rincian sebagai berikut:



Nama Aset Tetap	Jumlah (Rp)
Peralatan dan Mesin	231.968.999,00
Gedung dan Bangunan	36.080.000,00
<b>Total</b>	<b>268.048.999,00</b>

**Belanja  
Penanganan  
Pandemi COVID-19  
Rp 2.490.284.044,00**

#### B.2.4. Belanja Penanganan Pandemi COVID-19

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan anggaran belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp2.499.948.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp2.490.284.044,00 dengan rincian yang tersaji pada Tabel 11 sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Rincian Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19**

No	Akun	Alokasi Anggaran/DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	521241	12.253.000,00	12.246.000,00	Belanja Barang Non Operasional
2.	521841	254.027.000,00	253.958.357,00	Belanja Persediaan
3.	522192	9.350.000,00	7.997.000,00	Belanja Jasa
4.	524115	2.174.368.000,00	2.166.135.139,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.	523114	24.880.000,00	24.877.548,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
6.	532119	25.070.000,00	25.070.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
<b>Total</b>		<b>2.499.948.000,00</b>	<b>2.490.284.044,00</b>	

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar  
Rp213.438.581,00

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp213.438.581,00 dan Rp186.868.982,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

**Tabel 12**  
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Aset Lancar	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Persediaan	213.438.581,00	186.868.982,00
	<b>Total</b>	<b>213.438.581,00</b>	<b>186.868.982,00</b>

Persediaan  
Rp213.438.581,00

#### C.1.1. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp213.438.581,00 dan Rp186.868.982,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

**Tabel 13**  
Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis Persediaan	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Barang Konsumsi	91.701.681,00	121.275.489,00
Persediaan Lainnya	121.736.900,00	65.593.493,00
<b>Jumlah</b>	<b>213.438.581,00</b>	<b>186.868.982,00</b>

Selama Tahun 2021 terdapat Transfer Masuk sebesar Rp20.926.877,00 dengan Berita Acara Serah Terima nomor BAST-2176/SU05/2.1/2021 Tanggal 26 November 2021 berupa persediaan obat-obatan yang diterima dari satker lain sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada Perubahan Ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	TOCEF 200 mg	40	1.246.960,00
2	Cloviar	120	1.870.440,00
3	CEPTIK 200 mg	40	1.126.400,00
4	Cefspan	40	1.996.280,00
5	LEVOVID 500 mg	20	779.460,00
6	Moxibat	45	1.316.700,00
7	Isoprinosine	88	1.222.144,00
8	Isprinol	88	1.028.456,00
9	Inclovir	84	1.904.532,00
10	Interpec	1.500	1.732.500,00
11	Epexol	1.200	1.267.200,00
12	Promedex	1.100	1.573.000,00
13	Tuzalos	700	839.300,00
14	Topras	50	102.850,00
15	Anadex	50	170.500,00
16	PAMOL 500 mg	50	45.500,00
17	Sincronik	20	218.820,00
18	INHIPRAZ 16 mg	40	634.040,00
19	Gastrolan	40	485.040,00
20	Propepsa Syrup	3	316.305,00
21	Zegavit	100	492.100,00
22	For D3	30	85.350,00
23	Becomzet	200	473.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>20.926.877,00</b>

Pada tanggal pelaporan terdapat persediaan dalam kondisi usang sebesar Rp12.930.036,00 yang akan dilakukan penghapusan, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
Barang Konsumsi	11.707.560,00
Persediaan Lainnya	1.222.476,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.930.036,00</b>

Dari keseluruhan persediaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp213.438.581,00, terdapat persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp84.985.553,00 disajikan pada tabel berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Obat-Obatan	5.680	22.889.821,00
2	Masker	570	18.754.800,00
3	Ester C Holisticare	4.320	7.197.120,00
4	Lianhua Kapsul	12	804.000,00
5	Thermogun	2	1.650.000,00
6	Hand Sanitizer 55 ml	162	1.981.300,00
7	Disinfektan 5 L	4	1.180.000,00
8	Face Shield	240	1.864.560,00
9	Baju Hazmat	48	27.359.952,00
10	Hand Sanitizer 5 L	5	1.040.000,00
11	Hand Sanitizer 500 ml	2	264.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>84.985.553,00</b>



**Aset Tetap**  
Rp202.072.559.200,00

## C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp202.072.559.200,00 dan Rp202.784.410.074,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 14 berikut ini:

**Tabel 14**  
**Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

No	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Tanah	189.634.719.000,00	189.634.719.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.021.561.030,00	6.542.123.204,00
3	Gedung dan Bangunan	12.884.431.000,00	12.788.351.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	412.445.600,00	412.445.600,00
5	Aset Tetap Lainnya	23.990.000,00	33.988.100,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.720.000,00	28.720.000,00
	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>209.005.866.630,00</b>	<b>209.440.346.904,00</b>
7	Akumulasi Penyusutan	(6.933.307.430,00)	(6.655.936.830,00)
	<b>Nilai Buku</b>	<b>202.072.559.200,00</b>	<b>202.784.410.074,00</b>

**Tanah**  
Rp189.634.719.000,00

### C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki BPKP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp189.634.719.000,00 dan Rp189.634.719.000,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>189.634.719.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Hibah	0,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Transfer Keluar	(0,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>189.634.719.000,00</b>

Nilai perolehan Tanah tersebut terdiri dari 15 sertifikat hak milik seluas 22.186 m<sup>2</sup>, yang terletak di berbagai lokasi di Pontianak. Dari luas tanah 22.186 m<sup>2</sup>, seluas 7.909 m<sup>2</sup> digunakan untuk keperluan bangunan kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan sisanya tanah seluas 14.277 m<sup>2</sup> digunakan untuk bangunan rumah negara. Semua persil tanah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq BPKP.

Peralatan dan Mesin  
Rp6.021.561.030,00

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp6.021.561.030,00 dan Rp6.542.123.204,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.453.109.829,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp1.568.451.201,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan berikut ini:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	6.542.123.204,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Pembelian	231.968.999,00
- Transfer Masuk	130.117.291,00
- Reklasifikasi Masuk	92.598.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>454.684.290,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Reklasifikasi Keluar	(92.598.000,00)
- Penghapusan	(882.648.464,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(975.246.464,00)</b>
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	6.021.561.030,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(4.453.109.829,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>1.568.451.201,00</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Pembelian sebesar Rp231.968.999,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Mesin Laminating	1	3.740.000,00
2	Tempat Tidur Kayu	3	8.700.000,00
3	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	3.300.000,00
4	Lemari Es	2	4.895.000,00
5	AC Split	10	46.750.000,00
6	Dispenser	3	9.735.000,00
7	Mesin Jilid	1	3.960.000,00
8	Lemari Obat (Kaca)	1	3.600.000,00
9	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1	1.045.000,00
10	Printer	11	21.285.000,00
11	Kursi Roda	1	1.237.000,00
12	Tabung Pemadam Api	2	7.650.000,00
13	LCD Projector/Infocus	1	2.964.000,00
14	Sice	1	7.800.000,00
15	Mesin Pemootong Rumput	1	3.430.999,00
16	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1	1.595.000,00
17	Tensimeter	1	3.890.000,00
18	Digital Thermometer	4	6.750.000,00
19	Pompa Air	1	1.345.000,00
20	Alat Penghancur Kertas	2	4.490.000,00
21	Televisi	1	4.750.000,00
22	Alat Pemanas Processing (Water Heater)	1	4.080.000,00



23	Alat Studio Lainnya	2	11.817.000,00
24	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4	63.160.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>231.968.999,00</b>

Didalam nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp231.968.999,00 terdapat Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp25.070.000,00 berupa :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Sice	1	7.800.000,00
2	AC Split	3	14.025.000,00
3	Dispenser	1	3.245.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>25.070.000,00</b>

- Transfer Masuk sebesar Rp130.117.291,00 dengan 3 Berita Acara Serah Terima nomor BAST-338/IP.4/2021 Tanggal 28 April 2021, BAST-78/SU05/3/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 dan BAST-79/SU05/3/2021 Tanggal 12 Oktober 2021, merupakan peralatan dan mesin yang diterima dari satker lain pada tahun 2021, sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada Perubahan Ekuitas. Rincian transfer masuk sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Pesawat Telephone	4	13.424.541,00
2	Note Book	1	31.086.000,00
3	Voice Recorder	3	2.887.500,00
4	Camera Electronic	3	9.570.000,00
5	Alat Kedokteran Lainnya	1	68.200.000,00
6	Pen Camera	3	1.170.750,00
7	External/Portable Hardisk	3	3.778.500,00
<b>Jumlah</b>			<b>130.117.291,00</b>

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp92.598.000,00 merupakan kesalahan pencatatan Peralatan dan Mesin. Rincian Reklasifikasi Masuk sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Drone	2	52.998.000,00
2	UV Sterilizer	10	39.600.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>92.598.000,00</b>

- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp92.598.000,00 merupakan kesalahan pencatatan Peralatan dan Mesin. Rincian Reklasifikasi Keluar sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Pesawat Tak Berawak	2	52.998.000,00
2	Lemari Steril	10	39.600.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>92.598.000,00</b>



- Penghapusan BMN sebesar Rp882.648.464,00 merupakan penghapusan karena kondisi BMN rusak berat dengan surat persetujuan penghapusan nomor KEP-374/K.SU/05/2021 Tanggal 17 Mei 2021. Rincian Penghapusan BMN sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Alat Kantor	32	81.021.864,00
2	Alat Rumah Tangga	221	233.967.100,00
3	Alat Studio	15	80.064.500,00
4	Alat Komunikasi	7	8.710.000,00
5	Alat Kedokteran	4	2.312.000,00
6	Komputer Unit	48	370.122.500,00
7	Peralatan Komputer	34	102.145.500,00
8	Peralatan Olah Raga	1	4.125.000,00
9	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	4	180.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>882.648.464,00</b>

Selain nilai Peralatan dan Mesin yang dihapus diatas, terdapat penghapusan peralatan dan mesin yang tidak dicatat di Neraca namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi belanja modal sebesar Rp5.828.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Alat Kantor	58	2.759.000,00
2	Alat Rumah Tangga	10	1.142.600,00
3	Alat Studio	6	570.000,00
4	Alat Komunikasi	7	1.096.000,00
5	Peralatan Komputer	1	261.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>5.828.600,00</b>

Transaksi pembelian Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel sebesar Rp979.000,00 merupakan realisasi Belanja Barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Tabung Oksigen	1	979.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>979.000,00</b>

Sehingga nilai Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel sebesar Rp60.338.300,00 dengan rincian sebagai berikut ini:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	65.187.900,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Pembelian	979.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>979.000,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Penghapusan	(5.828.600,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(5.828.600,00)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>60.338.300,00</b>

Gedung dan  
Bangunan  
Rp12.884.431.000,00

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp12.884.431.000,00 dan Rp12.788.351.000,00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.276.408.266,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah Rp10.608.022.734,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	12.788.351.000,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Penyelesaian KDP	0,00
- Pengembangan Nilai Aset	36.080.000,00
- Hibah	60.000.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>96.080.000,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Transfer Keluar	(0,00)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(0,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(0,00)</b>
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	12.884.431.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(2.276.408.266,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>10.608.022.734,00</b>

Transaksi penambahan nilai Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu berupa:

- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp36.080.000,00 berupa renovasi lapangan tenis. Rincian Pengembangan Nilai Aset sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	36.080.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>36.080.000,00</b>

- Hibah sebesar Rp60.000.000,00. dengan Surat Perjanjian Hibah Nomor SPH-6/PW14/1/2021 tanggal 11 Mei 2021. Rincian hibah sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	60.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>60.000.000,00</b>

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp412.445.600,00 dan Rp412.445.600,00. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp201.859.335,00. sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp210.586.265,00.

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp412.445.600,00



Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	412.445.600,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Pengembangan KDP	0,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Transfer Keluar	(0,00)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(0,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(0,00)</b>
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	412.445.600,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(201.859.335,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>210.586.265,00</b>

Aset Tetap Lainnya  
Rp23.990.000,00

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp23.990.000,00 dan Rp33.988.100,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.930.000,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp22.060.000,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	33.988.100,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	20.680.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>20.680.000,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Penghapusan	(9.998.100,00)
- Transaksi Normalisasi BMN	(20.680.000,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(30.678.100,00)</b>
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	23.990.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1.930.000,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>22.060.000,00</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp20.680.000,00 merupakan tindak lanjut temuan BPK RI atas LKPP Tahun 2020 *Audited* terkait data anomali BMN yang ada di *database* e-rekon dan Laporan Keuangan terhadap Aset Tetap,



Aset Tetap Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Rincian Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Lukisan Cat Minyak	9	14.555.000,00
2	Barang bercorak Kesenian Lainnya	1	6.125.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>20.680.000,00</b>

- Mutasi kurang nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.998.100,00, penghapusan dilakukan karena kondisi BMN rusak berat dengan surat persetujuan penghapusan nomor KEP-374/K.SU/05/2021 Tanggal 17 Mei 2021. Rincian Penghapusan BMN sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	188	9.998.100,00
<b>Jumlah</b>			<b>9.988.100,00</b>

- Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp20.680.000,00 merupakan tindak lanjut temuan BPK RI atas LKPP Tahun 2020 Audited terkait data anomali BMN yang ada di database e-rekon dan Laporan Keuangan terhadap Aset Tetap, Aset Tetap Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Rincian Transaksi Normalisasi BMN sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Lukisan Cat Minyak	9	14.555.000,00
2	Barang bercorak Kesenian Lainnya	1	6.125.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>20.680.000,00</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Rp28.720.000,00

#### C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp28.720.000,00 dan Rp28.720.000,00.

Mutasi saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai perolehan per 31 Desember 2020	28.720.000,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Perolehan/Penambahan KDP	0,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(0,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Nilai buku per 31 Desember 2021</b>	<b>28.720.000,00</b>

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp28.720.000,00 merupakan penyelesaian KDP yang masih tertunda dikarenakan pada tahun 2020 telah di rencanakan pembangunan gedung kantor

dan rumah negara senilai Rp709.285.000,00 namun mengalami realokasi anggaran ke belanja penanganan COVID-19 sebesar Rp680.565.000,00.

Sampai dengan bulan April 2020 pembangunan gedung kantor tersebut baru sampai pada tahap perencanaan yaitu pembuatan desain bangunan dengan menyerap dana Rp28.720.000,00 atau 4,05 persen dari target yang diharapkan sampai selesai.

Hingga saat ini, proses pelaksanaan untuk melanjutkan KDP ditunda kembali karena pada bulan Juli 2021 terdapat refocusing anggaran belanja modal gedung dan bangunan dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 sesuai Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor S-932/SU/03/2021 Tanggal 9 Juli 2021.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
(Rp6.933.307.430,00)*

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp6.933.307.430,00 dan Rp6.655.936.830,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 15 berikut ini:

**Tabel 15**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021**

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	189.634.719.000,00	0,00	189.634.719.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.021.561.030,00	4.453.109.829,00	1.568.451.201,00
3	Gedung dan Bangunan	12.884.431.000,00	2.276.408.266,00	10.608.022.734,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	412.445.600,00	201.859.335,00	210.586.265,00
5	Aset Tetap Lainnya	23.990.000,00	1.930.000,00	22.060.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.720.000,00	0,00	28.720.000,00
	<b>Total</b>	<b>209.005.866.630,00</b>	<b>6.933.307.430,00</b>	<b>202.072.559.200,00</b>

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



No	Uraian	Saldo per 31/12/2020 (Rp)	Saldo per 31/12/2021 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	Peralatan dan Mesin	4.726.553.392,00	4.453.109.829,00	(273.443.563,00)	571.567.731,00	845.011.294,00
2	Gedung dan Bangunan	1.768.219.043,00	2.276.408.266,00	508.189.223,00	508.189.223,00	0,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	159.234.395,00	201.859.335,00	42.624.940,00	42.624.940,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>6.655.936.830,00</b>	<b>6.933.307.430,00</b>	<b>277.370.600,00</b>	<b>1.137.643.644,00</b>	<b>845.011.294,00</b>

Penjelasan atas selisih tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Penghentian Aset dari Penggunaan	882.468.464,00	0,00	0,00	0,00	882.468.464,00
2	Transfer Masuk	(33.482.320,00)	0,00	0,00	0,00	(33.482.320,00)
3	Reklasifikasi Keluar	5.284.950,00	0,00	0,00	0,00	5.284.950,00
4	Reklasifikasi Masuk	(9.259.800,00)	0,00	0,00	0,00	(9.259.800,00)
5	Hibah Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>845.011.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.011.294,00</b>

Aset Lainnya  
Rp7.630.875,00

### C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp7.630.875,00 dan Rp22.892.625,00, merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16  
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	61.047.000,00	61.047.000,00
	Nilai Perolehan		
4	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(53.416.125,00)	(38.154.375,00)
	<b>Nilai Buku</b>	<b>7.630.875,00</b>	<b>22.892.625,00</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp61.047.000,00

#### C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp61.047.000,00 dan Rp61.047.000,00. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp53.416.125,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp7.630.875,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, yang



digunakan untuk menunjang operasional kantor, berupa *Software* dan lisensi.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	61.047.000,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	61.047.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(53.416.125,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	7.630.875,00

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp53.416.125,00

### C.3.2. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp53.416.125,00 dan Rp38.154.375,00. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut. Saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri atas:

No	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	53.416.125,00	38.154.375,00
	<b>Total</b>	<b>53.416.125,00</b>	<b>38.154.375,00</b>

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2020 (Rp)	Saldo per 31/12/2021 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	38.154.375,00	53.416.125,00	15.261.750,00	15.261.750,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>38.154.375,00</b>	<b>53.416.125,00</b>	<b>15.261.750,00</b>	<b>15.261.750,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban Jangka  
Pendek  
Rp122.894.809,00

### C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp122.894.809,00 dan Rp30.274.180,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17

## Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	70.510.920,00	22.866.513,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	52.383.889,00	7.407.667,00
	<b>Total</b>	<b>122.894.809,00</b>	<b>30.274.180,00</b>

Utang Kepada Pihak  
Ketiga  
Rp70.510.920,00

## C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp70.510.920,00 dan Rp22.866.513,00. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18

Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar – Tagihan Langganan Air Bulan Desember 2021	1.251.200,00	1.587.700,00
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar – Tagihan Langganan Telepon Bulan Desember 2021	4.056.638,00	972.756,00
3	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar – Tagihan Langganan Listrik Bulan Desember 2021	24.343.082,00	20.306.057,00
4	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar – Uang Makan Bulan Desember 2021	40.860.000,00	0,00
	<b>Total Utang Kepada Pihak Ketiga</b>	<b>70.510.920,00</b>	<b>22.866.513,00</b>

Pendapatan  
Diterima Dimuka  
Rp52.383.889,00

## C.4.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp52.383.889,00 dan Rp7.407.667,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pengakuan kewajiban perhitungan akrual per tanggal Neraca atas pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara (BMN) yang diterima terlebih dahulu.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

**Tabel 19**  
**Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021**

No	Obyek Sewa	Jangka Waktu (Periode)	Nilai Sewa (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2021 (Rp)
1	ATM BRI	3 Tahun (1 Mei 2021 s.d. 30 April 2024)	66.785.000,00	51.943.889,00
2	Ruangan untuk Kantin	1 Tahun (1 Mei 2021 s.d. 30 April 2022)	660.000,00	220.000,00
3	Ruangan untuk Koperasi	1 Tahun (1 Mei 2021 s.d. 30 April 2022)	660.000,00	220.000,00
<b>Total</b>			<b>68.105.000,00</b>	<b>52.383.889,00</b>

**Ekuitas**  
Rp202.171.546.686,00

### C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp202.171.546.686,00 dan Rp202.963.897.501,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Surplus/(Defisit) dari  
Kegiatan Operasional  
(Rp20.268.695.429,00)

**D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp20.268.695.429,00 dan Rp22.522.670.299,00. Jumlah per 31 Desember 2021 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp31.536.378,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp20.309.843.332,00.

Pendapatan  
Operasional  
Rp31.536.378,00

**D.1.1. Pendapatan Operasional**

Pendapatan Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp31.536.378,00 dan Rp31.655.400,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp31.536.378,00

**D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp31.536.378,00 dan Rp31.655.400,00.

Penurunan PNBP tersebut dikarenakan selama Tahun 2021 banyak rumah dinas yang tidak dihuni sehingga pendapatan sewa berkurang.

Rincian PNBP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

**Tabel 20**  
**Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak**  
**per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	31.536.378,00	31.655.400,00	(119.022,00)	(0,38)
<b>Total</b>	<b>31.536.378,00</b>	<b>31.655.400,00</b>	<b>(119.022,00)</b>	<b>(0,38)</b>

Jika realisasi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar minus Rp44.857.200,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 21 berikut ini :

**Tabel 21**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional**  
**per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA**

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	31.655.400,00	76.512.600,00	(44.857.200,00)
<b>Total</b>	<b>31.655.400,00</b>	<b>76.512.600,00</b>	<b>(44.857.200,00)</b>

Selisih Pendapatan Operasional menurut LO dan LRA sebesar minus Rp44.857.200,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan diterima s.d 2021 untuk masa pemanfaatan tahun 2020	7.407.667,00
Pendapatan diterima s.d. 2021, namun masa pemanfaatan aset melewati 2021	(52.383.889,00)
<b>Total</b>	<b>(44.857.200,00)</b>

*Beban Operasional*  
*Rp20.310.656.171,00*

#### D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp20.310.656.171,00 dan Rp22.554.325.699,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

**Tabel 22**  
**Rincian Beban Operasional**  
**per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	12.633.403.495,00	15.397.999.134,00	(2.764.595.639,00)	(17,95)
Beban Persediaan	428.875.892,00	475.333.144,00	(46.457.252,00)	(9,77)
Beban Barang dan Jasa	1.880.018.083,00	2.230.425.962,00	(350.407.879,00)	(15,71)
Beban Pemeliharaan	586.610.657,00	461.507.867,00	125.102.790,00	27,11
Beban Perjalanan Dinas	3.644.104.400,00	2.981.080.725,00	663.023.675,00	22,24
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.137.643.644,00	1.007.978.867,00	129.664.777,00	12,86
<b>Total</b>	<b>20.310.656.171,00</b>	<b>22.554.325.699,00</b>	<b>(2.243.669.528,00)</b>	<b>(9,95)</b>

Beban Pegawai  
Rp12.633.403.495,00

#### D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp12.633.403.495,00 dan Rp15.397.999.134,00.

Penurunan Beban Pegawai tersebut dikarenakan terdapat penurunan jumlah pegawai dibandingkan dengan tahun 2020.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

**Tabel 23**  
**Rincian Beban Pegawai**  
**per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	5.929.252.229,00	7.007.089.682,00	(1.077.837.453,00)	(15,38)
Beban Lembur	421.873.000,00	903.666.000,00	(481.793.000,00)	(53,32)
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	6.282.278.266,00	7.487.243.452,00	(1.204.965.186,00)	(16,09)
<b>Total</b>	<b>12.633.403.495,00</b>	<b>15.397.999.134,00</b>	<b>(2.764.595.639,00)</b>	<b>(17,95)</b>

Jika realisasi LO per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp40.860.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

**Tabel 24**  
**Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai**  
**Per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA**

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	5.929.252.229,00	5.888.392.229,00	40.860.000,00
Beban Lembur	421.873.000,00	421.873.000,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	6.282.278.266,00	6.282.278.266,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.633.403.495,00</b>	<b>12.592.543.495,00</b>	<b>40.860.000,00</b>



Selisih Beban Pegawai menurut LO dan LRA sebesar minus Rp40.860.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Belanja Pegawai Uang Makan Tahun 2021 yang masih harus dibayar di Tahun 2022	40.860.000,00
<b>Total</b>	<b>40.860.000,00</b>

**Beban Persediaan**  
Rp428.875.892,00

#### D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp428.875.892,00 dan Rp475.333.144,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Penurunan Beban Persediaan tersebut dikarenakan penurunan penggunaan persediaan untuk pencegahan penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

**Tabel 25**  
**Rincian Beban Persediaan**  
**per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	223.994.595,00	255.888.554,00	(31.893.959,00)	(12,46)
Beban Persediaan Lainnya	204.931.297,00	219.444.590,00	(14.513.293,00)	(6,61)
<b>Total</b>	<b>428.875.892,00</b>	<b>475.333.144,00</b>	<b>(46.407.252,00)</b>	<b>(9,76)</b>

Realisasi Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2021 menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar minus Rp18.522.758,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 26 berikut ini:

**Tabel 26**  
**Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Persediaan**  
**Per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA**

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Persediaan Konsumsi	223.994.595,00	122.012.590,00	101.982.005,00
Beban Persediaan Lainnya	204.931.297,00	71.477.703,00	133.453.594,00
Beban Persediaan - Penanganan Pandemi Covid	0,00	253.958.357,00	(253.958.357,00)
<b>Total</b>	<b>428.875.892,00</b>	<b>447.448.650,00</b>	<b>(18.522.758,00)</b>

Selisih realisasi Beban Persediaan sebesar minus Rp18.522.758,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembelian Persediaan Konsumsi	206.078.347,00
Pemakaian Persediaan Konsumsi	(223.994.595,00)
Pembelian Persediaan Lainnya	241.370.303,00
Pemakaian Persediaan Lainnya	(204.931.297,00)
<b>Total</b>	<b>18.522.758,00</b>

**Beban Barang dan  
Jasa**  
Rp1.880.018.083,00

#### D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.880.018.083,00 dan Rp2.230.425.962,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Penurunan Beban Barang dan Jasa tersebut dikarenakan pengeluaran untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 masih belum digunakan.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

**Tabel 27**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa**  
**per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Operasional	1.478.967.606,00	1.573.231.931,00	(94.264.325,00)	(5,99)
Beban Barang Non Operasional	52.677.451,00	174.482.500,00	(121.805.049,00)	(69,81)
Beban Jasa	348.373.026,00	482.711.531,00	(134.338.505,00)	(27,83)
<b>Total</b>	<b>1.880.018.083,00</b>	<b>2.230.425.962,00</b>	<b>(350.407.879,00)</b>	<b>(15,71)</b>

Jika realisasi LO per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp6.784.407,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 28 berikut ini:

**Tabel 28**  
**Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa**  
**Per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA**

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	1.478.967.606,00	1.478.967.606,00	0,00
Beban Barang Non Operasional	52.677.451,00	52.677.451,00	0,00
Beban Jasa	348.373.026,00	341.588.619,00	6.784.407,00
<b>Total</b>	<b>1.880.018.083,00</b>	<b>1.873.233.676,00</b>	<b>6.784.407,00</b>

Selisih realisasi Beban Jasa sebesar Rp6.784.407,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran langganan listrik tahun 2021 atas beban yang terutang tahun 2020	(20.306.057,00)
Beban langganan listrik tahun 2021 yang masih harus dibayar di Tahun 2022	24.343.082,00
Pembayaran langganan telepon tahun 2021 atas beban yang terutang tahun 2020	(972.756,00)
Beban langganan telepon tahun 2021 yang masih harus dibayar di Tahun 2022	4.056.638,00
Pembayaran langganan air tahun 2021 atas beban yang terutang tahun 2020	(1.587.700,00)
Beban langganan air tahun 2021 yang masih harus dibayar di Tahun 2022	1.251.200,00
<b>Total</b>	<b>6.784.407,00</b>



**Beban**  
**Pemeliharaan**  
**Rp586.610.657,00**

#### D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp586.610.657,00 dan Rp461.507.867,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Kenaikan Beban Pemeliharaan tersebut dikarenakan digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 29 berikut ini:

**Tabel 29**  
**Rincian Beban Pemeliharaan**  
**per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	315.208.083,00	172.478.012,00	142.730.071,00	82,75
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	271.402.574,00	289.029.855,00	(17.627.281,00)	(6,10)
<b>Total</b>	<b>586.610.657,00</b>	<b>461.507.867,00</b>	<b>125.102.790,00</b>	<b>27,11</b>

Jika realisasi LO per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp0,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 30 berikut ini:

**Tabel 30**  
**Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan**  
**Per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA**

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	315.208.083,00	315.208.083,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	271.402.574,00	271.402.574,00	0,00
<b>Total</b>	<b>586.610.657,00</b>	<b>586.610.657,00</b>	<b>0,00</b>

**Beban Perjalanan  
Dinas**  
Rp3.644.104.400,00

#### D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.644.104.400,00 dan Rp2.981.080.725,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Kenaikan Beban Perjalanan Dinas tersebut dikarenakan banyaknya penugasan pengawasan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 31 berikut ini:

**Tabel 31**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas**  
**per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	1.309.219.261,00	1.155.387.455,00	153.831.806,00	13,31
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	168.750.000,00	140.140.000,00	28.610.000,00	20,42
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	85.950.000,00	(85.950.000,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi COVID-19	2.166.135.139,00	1.616.070.270,00	550.064.869,00	34,04
<b>Total</b>	<b>3.644.104.400,00</b>	<b>2.997.547.725,00</b>	<b>646.556.675,00</b>	<b>21,57</b>

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 sama dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

**Beban Penyusutan  
dan Amortisasi**  
Rp1.137.643.644,00

#### D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.137.643.644,00 dan Rp1.007.978.867,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 32 berikut :

**Tabel 32**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	571.567.731,00	443.467.398,00	128.100.333,00	28,89
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	508.189.223,00	506.624.779,00	1.564.444,00	0,31
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42.624.940,00	42.624.940,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Software	15.261.750,00	15.261.750,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.137.643.644,00</b>	<b>1.007.978.867,00</b>	<b>129.664.777,00</b>	<b>12,86</b>

#### D.1.2.7. Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Beban khusus penanganan pandemi COVID-19 disajikan pada Tabel 33 berikut ini:

**Tabel 33**  
**Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19**

Akun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
521241	Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	12.253.000,00	12.246.000,00	99,94
522192	Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	9.350.000,00	7.997.000,00	85,53
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi COVID-19	24.880.000,00	24.877.548,00	99,99
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	2.174.368.000,00	2.166.135.139,00	99,62
	<b>Total</b>	<b>2.220.851.000,00</b>	<b>2.211.255.687,00</b>	<b>99,57</b>

#### D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit)  
dari Kegiatan Non  
Operasional  
Rp10.424.364,00

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp10.424.364,00 dan minus Rp4.197.371,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.424.364,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp21.155.400,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp10.731.036,00.



Surplus/(Defisit)  
dari Pelepasan Aset  
Non Lancar  
Rp21.155.400,00

### D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp21.155.400,00, dan Rp0,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp31.333.500,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp10.178.100,00.

Pendapatan  
Pelepasan Aset  
Non Lancar  
Rp31.333.500,00

#### D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp31.333.500,00 dan Rp0,00. Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.333.500,00 merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional.

Kenaikan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dikarenakan terdapat penjualan dari penghapusan aset BMN.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 34 berikut ini:

**Tabel 34**  
**Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar**  
**per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindah-tanganan BMN Lainnya	31.333.500,00	0,00	31.333.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>31.333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.333.500,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 sama dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

**Beban Pelepasan  
Aset Non Lancar**  
Rp10.178.100,00

### D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp10.178.100,00 dan Rp0,00. Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.178.100,00 merupakan nilai buku aset yang dihapus pada tanggal neraca karena adanya pelepasan hak atas aset tersebut sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan pos-pos neraca.

Kenaikan Beban Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dikarenakan adanya penjualan dari penghapusan aset BMN yang berpengaruh terhadap Beban Kerugian Pelepasan Aset.

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	10.178.100,00	0,00	10.178.100,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.178.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.178.100,00</b>	<b>0,00</b>

**Surplus/(Defisit)  
dari Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya**  
(Rp10.731.036,00)

### D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp10.731.036,00 dan Rp4.197.371,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.731.036,00 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.199.000,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp12.930.036,00.

**Pendapatan dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya**  
Rp2.199.000,00

#### D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.199.000,00 dan Rp11.113.715,00.

Penurunan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut dikarenakan tidak adanya Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 35 berikut ini:

**Tabel 35**  
**Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	2.199.000,00	0,00	2.199.000,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	11.113.715,00	(11.113.715,00)	(100,00)
<b>Total</b>	<b>2.199.000,00</b>	<b>11.113.715,00</b>	<b>(8.914.715,00)</b>	<b>(80,21)</b>

Jika realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp0,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 36 berikut ini:

**Tabel 36**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 Menurut LO dan LRA**

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.199.000,00</b>	<b>2.199.000,00</b>	<b>0,00</b>

Beban dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya  
Rp12.930.036,00

#### D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp12.930.036,00 dan Rp15.311.086,00.

Penurunan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut dikarenakan adanya Beban Persediaan yang telah rusak/using sehingga tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional.



Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Tabel 37 berikut ini:

**Tabel 37**  
**Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**  
**per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2021	31 Des 2020	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	15.311.086,00	(15.311.086,00)	(100,00)
Beban Persediaan Rusak/Usang	12.930.036,00	0,00	12.930.036,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.930.036,00</b>	<b>15.311.086,00</b>	<b>(2.381.050,00)</b>	<b>(15,55)</b>

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp202.963.897.501,00*

**E.1. Ekuitas Awal**

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp202.963.897.501,00 dan Rp202.771.893.854,00.

*Surplus/(Defisit) LO*  
*(Rp20.268.695.429,00)*

**E.2. Surplus/(Defisit) LO**

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp20.268.695.429,00 dan Rp22.526.867.670,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

*Koreksi Yang Menambah/ (Mengurangi) Ekuitas*  
*( Rp3.974.850,00)*

**E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas**

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.974.850,00 dan Rp0,00. Jumlah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersebut terdiri atas:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Koreksi atas Reklasifikasi	3.974.850,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.974.850,00</b>	<b>0,00</b>

*Koreksi atas Reklasifikasi*  
*(Rp3.974.850,00)*

**E.3.1. Koreksi atas Reklasifikasi**

Jumlah Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.974.850,00 dan Rp0,00. Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin – Reklasifikasi Masuk	(9.259.800,00)	0,00
Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin – Reklasifikasi Keluar	5.284.950,00	0,00
<b>Total</b>	<b>(3.974.850,00)</b>	<b>0,00</b>

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp19.479.506.625,00*

#### **E.4. Transaksi Antar Entitas**

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp19.479.506.625,00 dan Rp22.718.871.317,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, terdiri atas :

<b>Uraian</b>	<b>31 Des 2021 (Rp)</b>	<b>31 Des 2020 (Rp)</b>
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.411.989.877,00	22.729.623.717,00
Diterima dari Entitas Lain	(110.045.100,00)	(10.752.400,00)
Transfer Masuk	117.561.848,00	0,00
Pengesahan Hibah Langsung	60.000.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>19.479.506.625,00</b>	<b>22.718.871.317,00</b>

*Ditagihkan ke Entitas  
Lain  
Rp19.411.989.877,00*

##### **E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain**

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp19.411.989.877,00 dan Rp22.729.623.717,00. Jumlah per 31 Desember 2021 merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2021.

*Diterima dari Entitas  
Lain  
Rp110.045.100,00*

##### **E.4.2. Diterima dari Entitas Lain**

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp110.045.100,00 dan Rp10.752.400,00. Jumlah per 31 Desember 2021 merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 .

*Transfer Masuk  
Rp117.561.848,00*

##### **E.4.3. Transfer Masuk**

Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp117.561.848,00 dan Rp0,00. Jumlah per 31 Desember 2021 merupakan nilai buku aset yang diterima dari Pusat Informasi Pengawasan BPKP dan Biro Umum BPKP berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Lancar Persediaan dengan rincian sebagai berikut:



Satker Pengirim	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Pusat Informasi Pengawasan	44.510.541,00	9.255.570,00	35.254.971,00
Biro Umum	68.200.000,00	6.820.000,00	61.380.000,00
Biro Umum	17.406.750,00	17.406.750,00	0,00
Biro Umum (Persediaan)	20.926.877,00	0,00	20.926.877,00
	<b>151.044.168,00</b>	<b>33.482.320,00</b>	<b>117.561.848,00</b>

*Pengesahan Hibah Langsung*  
Rp60.000.000,00

#### E.4.4. Pengesahan Hibah Langsung

Jumlah Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp0,00. Jumlah per 31 Desember 2021 merupakan penerimaan hibah aset berupa bangunan lapangan tenis dari Ketua Pembina Olah Raga dan Seni BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai hibah sebesar Rp60.000.000,00 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor SPH-6/PW14/1/2021 tanggal 11 Mei 2021.

*Ekuitas Akhir*  
Rp202.171.546.686,00

#### E.5. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp202.171.546.686,00 dan Rp202.963.897.501,00. Jumlah per 31 Desember 2021 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp202.294.441.495,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp122.894.809,00.

**F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA****F.1. Informasi Biaya Bantuan Kedinasan**

Selama tahun 2021 kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, juga berasal dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing satuan kerja, yang anggarannya tidak tersedia dalam DIPA. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, jumlah penugasan yang dibiayai mitra kerja sebanyak 52 penugasan dan menghasilkan 52 LHP. Adapun realisasi biaya bantuan kedinasan dari mitra kerja sebesar Rp348.859.553,00, dengan rincian sebagai berikut:

Korwas	Jumlah Penugasan	Jumlah LHP	Jumlah Dana (Rp)
Bidang IPP (Perekonomian)	10	10	81.202.000,00
Bidang IPP (Polhukam)	10	10	
Bidang APD	4	4	48.417.800,00
Bidang AN	27	27	196.749.238,00
Bidang Investigasi	1	1	22.490.515,00
Bidang P3A	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>348.859.553,00</b>

Biaya Bantuan Kedinasan seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Berdasarkan penugasan dari pimpinan unit kerja masing-masing berupa SK Tim Gabungan/Surat Tugas maka diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja. Pada akhir kegiatan/penugasan, pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi biaya perjalanan dinas, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.